

## KORELASI MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN KEPATUHANWAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA PANGKALPINANG

Fikri Andra Aditya<sup>1</sup>, Karmawan<sup>2</sup>, Julia<sup>3</sup>,  
Universitas Bangka Belitung, [Fikriandra2001@gmail.com](mailto:Fikriandra2001@gmail.com) <sup>2</sup>karmawan77@gmail.com3  
[saputrajulia07@gmail.com](mailto:saputrajulia07@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pangkalpinang. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah penerapan langkah-langkah modernisasi berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Metodologi penelitian kuantitatif digunakan dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang dibagikan kepada sampel yang representatif dari wajib pajak orang pribadi dan badan di Kota Pangkalpinang. Studi ini mencakup data primer dan sekunder untuk memastikan analisis yang komprehensif. Data primer dikumpulkan dari kuesioner, dengan fokus pada aspek-aspek seperti kesadaran wajib pajak terhadap inisiatif modernisasi, persepsi mereka tentang efisiensi sistem baru, dan tingkat kemudahan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Analisis statistik, termasuk uji korelasi dan analisis regresi, akan dilakukan untuk menentukan tingkat korelasi antara upaya modernisasi dan kepatuhan wajib pajak. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah efektivitas inisiatif modernisasi dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan di Kota Pangkalpinang. Temuan ini akan bermanfaat bagi administrator pajak, pembuat kebijakan, dan peneliti dalam menyusun strategi berbasis bukti untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan pengumpulan pendapatan secara keseluruhan. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya pengetahuan tentang modernisasi administrasi perpajakan dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi otoritas pajak untuk merampingkan sistem perpajakan, mendorong kepatuhan sukarela, dan mempromosikan proses pengumpulan pendapatan yang lebih efisien di daerah.

**Kata Kunci :** Modernisasi, Administrasi Perpajakan, perilaku, kepatuhan wajib pajak, kewajiban perpajakannya.

### ABSTRACT

*This Research investigates the correlation between the modernization of the tax administration system and the compliance behavior of individual and corporate taxpayers at the Pratama Tax Service Office in Pangkalpinang City. The objective is to analyze whether the implementation of modernization measures has a significant impact*

*on taxpayers' compliance in meeting their tax obligations. Quantitative research methodology is employed, utilizing data collected through structured questionnaires distributed to a representative sample of individual and corporate taxpayers in Pangkalpinang City. The study encompasses both primary and secondary data to ensure a comprehensive analysis. The primary data is gathered from the questionnaires, focusing on aspects such as taxpayers' awareness of the modernization initiatives, their perception of the efficiency of the new system, and the level of ease in fulfilling their tax responsibilities. Statistical analysis, including correlation tests and regression analysis, will be conducted to determine the degree of correlation between modernization efforts and taxpayer compliance. The expected outcomes of this research will shed light on the effectiveness of modernization initiatives in fostering compliance among individual and corporate taxpayers in Pangkalpinang City. The findings will be valuable for tax administrators, policymakers, and researchers in devising evidence-based strategies to enhance taxpayer compliance and overall revenue collection. In conclusion, this research aims to contribute to the growing body of knowledge on tax administration modernization and its implications on taxpayer compliance. The research findings are expected to provide practical recommendations for tax authorities to streamline the tax system, encourage voluntary compliance, and promote a more efficient revenue collection process in the region.*

**Keywords:** *modernization, tax administration system, behavior, taxpayers' compliance, tax obligations.*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Negara (APBN) di Indonesia, mencakup sekitar 70% dari pengeluaran negara yang dibiayai melalui dana pajak (Richa, 2019). Kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia sehari-hari tak lepas dari pajak, yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran terkait visi dan misinya sebagai penguasa negara.

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa mendapatkan prestasi kembali, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum terkait tugas pemerintahan (Mardiasmo, 2011). Penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendanai negara dan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik (Siswanti, 2021). Selain itu, penerimaan

pajak juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi suatu negara dan menjadi spesialis untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di masing-masing daerah.

Sebagai sumber penerimaan yang paling berpengaruh di Indonesia, target penerimaan pajak harus selalu meningkat agar setiap kegiatan negara dapat berjalan lancar. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia sejak tahun 2020, memiliki dampak besar terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk sektor perpajakan. Kebijakan lockdown yang diambil oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 berdampak pada berubahnya pola dan budaya kerja di berbagai usaha di Indonesia, termasuk sektor perpajakan. Hal ini mengakibatkan terhambatnya keefektifan dan kelancaran kepatuhan wajib pajak.

Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai

reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Reformasi ini mencakup penyederhanaan struktur pajak, pengembangan strategi yang sesuai, komitmen politik yang kuat, dan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan. Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, mudah, dan efisien sehingga mendorong kesadaran dan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak.

Dalam konteks ini, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul "Korelasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pangkalpinang." Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak di Kota Pangkalpinang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman dalam menghadapi tantangan perpajakan di era yang terus berkembang dan berubah.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Model Penerimaan Teknologi (TAM)**

Model Penerimaan Teknologi (TAM) adalah salah satu teori yang merumuskan pengaruh penggunaan sistem informasi dan biasanya digunakan untuk menjelaskan penerimaan yang dilakukan oleh individu untuk menggunakan sistem informasi, juga dikenal sebagai Metode Penerimaan Teknologi Informasi atau TAM. Metode TAM pertama kali dikenalkan oleh Davis pada tahun 1989 yang merupakan pengembangan dari Teori Tindakan Rasional, yang sebelumnya diperkenalkan oleh Ajzen dan

Fishbein (1975). Tujuan dari studi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menentukan tingkat penerimaan penggunaan komputer dan perilaku pengguna akhir sebuah teknologi (Silva, 2015).

### **Teori Perilaku yang Diharapkan (TPB)**

Teori Perilaku yang Diharapkan (TPB) dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagai pengembangan dari Teori Tindakan Rasional (TRA) yang menghubungkan perilaku individu dalam menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam teori TPB adalah niat individu untuk melaksanakan perilaku, di mana niat ini diindikasikan oleh seberapa besar keinginan seseorang untuk mencoba atau berusaha melaksanakan perilaku tersebut. Niat ini dipengaruhi oleh tiga alasan, yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol (Kurniawati dan Toly, 2014).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses reformasi dan pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan untuk mencapai tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi dan meningkatkan kinerja aparat perpajakan. Tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah untuk mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Sadhani, 2012). Modernisasi sistem administrasi perpajakan mencakup perubahan dalam administrasi yang memudahkan wajib pajak dan aparat perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sofyan, 2005).

### **Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan negara dan sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Resmi, 2016).

### **Jenis-jenis Pajak**

Pajak dapat dibedakan berdasarkan golongan, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan golongan, pajak dapat dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2011).

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak dapat berupa tarif sebanding/proporsional, tarif tetap, tarif progresif, atau tarif regresif, tergantung pada besarnya pajak yang dikenakan pada subjek pajak (Mardiasmo, 2009).

### **Syarat Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak harus adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien, dan sistem pemungutan pajak harus sederhana untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya (Rahayu, 2010).

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi. Sanksi perpajakan dapat berupa

sanksi administrasi atau sanksi pidana, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2016).

### **Wajib Pajak**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong, atau pemungut pajak. Wajib pajak harus mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) (Pohan, 2017).

Dari penelitian terdahulu, ditemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemanfaatan teknologi, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, terdapat berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dan sistem pemungutan pajak yang berlaku (Sugiarto, 2018; Maulana M., 2022; Pernamasari dan Rahmawati, 2021; Lestary, 2021).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan untuk memberikan bukti empiris tentang korelasi antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pangkalpinang. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di wilayah Kota Pangkalpinang.

### **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang

diperoleh dari responden melalui kuisioner dengan skala likert 5. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuisioner yang disebarakan baik secara offline maupun online.

## **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 1) Wajib pajak orang pribadi wilayah Kota Pangkalpinang, dan 2) Wajib pajak badan di wilayah Kota Pangkalpinang. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 97 responden untuk wajib pajak orang pribadi dan 34 responden untuk wajib pajak badan.

## **Instrumen Penelitian dan Pengukuran Variabel**

Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala likert 5, terdiri dari dua variabel utama: 1) Modernisasi Administrasi Pajak, dan 2) Kepatuhan Wajib Pajak. Skala likert 5 digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang ada dalam kuesioner.

## **Analisis Data**

Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif menggunakan statistik, serta dilakukan uji kualitas data untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji normalitas data akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, sedangkan untuk uji hipotesis akan digunakan korelasi Pearson untuk menguji hubungan antar variabel dan uji determinasi untuk mengetahui koefisien determinasi antara variabel X dengan Y.

Demikianlah metodologi penelitian yang akan digunakan untuk mengkaji korelasi modernisasi sistem administrasi

perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak di Kota Pangkalpinang. Semoga penelitian ini memberikan hasil yang bermanfaat bagi pemahaman dan pengembangan sistem administrasi perpajakan."

## **PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pangkalpinang memiliki sejarah singkat sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan penghasil komoditas timah terbesar di Indonesia. Terletak di ibukota provinsi Pangkalpinang, kantor ini dikenal sebagai Kota beribu senyuman dan menjadi penggerak perekonomian melalui sektor pertambangan, perdagangan, administrasi pemerintahan, dan konstruksi. Wilayah kerja KPP Pratama Pangkalpinang mencakup 7 Kecamatan dan memiliki 77 sumber daya manusia yang berintegritas tinggi dan kompeten dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

#### **4.1.2 Visi**

Visi KPP Pratama Pangkalpinang adalah "Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara."

#### **4.1.3 Misi**

Misi KPP Pratama Pangkalpinang meliputi:

- Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- Memberikan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- Membentuk aparat pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional.

- Menyediakan kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

dilakukan secara online dan offline. Seluruh kuesioner yang didistribusikan berhasil dikembalikan, sehingga tingkat pengembalian mencapai 100%.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pangkalpinang

KPP Pratama Pangkalpinang memiliki struktur organisasi yang mencakup beberapa seksi, antara lain:

- Sub Bagian Umum yang bertanggung jawab atas tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta rumah tangga.
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang mengurus bank data, penatausahaan alat keterangan, rencana penerimaan pajak, serta laporan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Seksi Pelayanan yang terdiri dari Bagian Pelayanan dan Bagian Tempat Pelayanan Terpadu untuk menerima laporan pajak dari wajib pajak dan memberikan layanan terkait.
- Seksi Ekstensifikasi yang melakukan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan, penilaian nilai objek pajak, serta kegiatan ekstensifikasi terhadap wajib pajak.
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang melakukan konsultasi teknis di bidang perpajakan, mengawasi kepatuhan wajib pajak, dan melakukan kegiatan intensifikasi wajib pajak.

#### 4.2 Deskripsi Sampel Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pangkalpinang. Penelitian menggunakan metode kuesioner yang disebar ke 131 wajib pajak pribadi dan badan sebagai responden. Penyebaran kuesioner

**Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner**

Rincian Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang Didistribusikan	131 Kuesioner
Kuesioner yang Kembali	131 Kuesioner
Kuesioner yang Tidak Dapat Diolah	-
Kuesioner yang Dapat Diolah	131 Kuesioner
Tingkat Pengembalian	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

#### 4.3 Hasil Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel Modernisasi Administrasi Pajak (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel X memiliki nilai rata-rata sebesar 19.22 dan standar deviasi sebesar 1.51. Variabel Y memiliki nilai rata-rata sebesar 16.15 dan standar deviasi sebesar 1.44. Data dari kedua variabel menunjukkan hasil yang baik, karena memiliki standar deviasi yang rendah, menandakan penyimpangan data yang kecil.

**Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
X1	131	16.00	23.00	19.2214	1.5104
Y	131	13.00	22.00	16.1527	1.4436
ValidN(listwise) 131					

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

## 4.4 Uji Instrumen Penelitian

### 4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana alat ukur tersebut dapat digunakan dan seberapa konsisten jawaban responden dari waktu ke waktu. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian valid, dengan nilai Pearson correlation yang signifikan. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, menandakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang tinggi.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian**

Variabel	Instrumen	Pearson Correlation	Sig. (tailed)	Keterangan
Modernisasi Administrasi Pajak (X)	MAP 01	0,611	0,000	Valid
	MAP 02	0,600	0,000	Valid
	MAP 03	0,467	0,000	Valid
	MAP 04	0,443	0,000	Valid
	MAP 05	0,293	0,001	Valid
	MAP 06	0,428	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP 01	0,421	0,000	Valid
	KWP 02	0,600	0,000	Valid
	KWP 03	0,455	0,000	Valid
	KWP 04	0,639	0,000	Valid
	KWP 05	0,325	0,000	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

### 4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat pengukuran untuk menilai konsistensi dari jawaban responden dari waktu ke waktu berdasarkan butir pertanyaan dalam kuesioner. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan nilai Cronbach's alpha pada taraf signifikansi 5%. Setiap butir pernyataan dalam kuesioner dianggap reliabel jika nilai

Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,70.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas**

no	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Modernisasi Administrasi Pajak (X)	0,809	Reliabel
2	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,728	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel modernisasi administrasi pajak memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,702, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,728. Diketahui secara keseluruhan variabel di atas memiliki nilai Cronbach Alpha diatas atau sama dengan 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan-pertanyaan dalam kelima variabel yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai reliabilitas yang tinggi.

## 4.5 Uji Prasyarat Analisis Uji Hipotesis

### 4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu maupun residual data berdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Syarat pada model regresi adalah bahwa residual berdistribusi normal jika data memiliki nilai signifikan atau nilai probabilitas lebih dari 0,05.

## 4.6 Uji Hipotesis

### 4.6.1 Uji Korelasi

Untuk membuktikan diterima atau tidaknya hipotesis yang telah peneliti

ajukan. Untuk itu perlu dibuktikan dengan mencari nilai koefisien korelasi antara variabel modernisasi administrasi pajak (X) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) menggunakan rumus Korelasi Product Moment.

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}} \\
 &= \frac{131(40635) - (2518)(2114)}{\sqrt{131(48696) - (2518)^2}[131(34370) - (2114)^2]} \\
 &= \frac{(5323185) - (5323052)}{\sqrt{(6379176) - (6340324)(4502470) - (4468996)}} \\
 &= \frac{133}{(38852)(33474)} \\
 &= \frac{133}{\sqrt{130053185}} \\
 &= \frac{133}{36062} = 0,36004
 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari nilai perhitungan di atas, diperoleh nilaisebesar 0,36004 sedangkan pada taraf signifikansi 5% dengan N 131-2 = 129 diketahui sebesar 0,171. Karna lebihbesar dari dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 dan H2 diterima, artinya terdapat korelasi atau hubunganTerdapat korelasi signifikan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada Kantor Pelayanan Pratama Kota Pangkalpinang.

#### 4.6.2 Uji Signifikasi

untuk menguji signifikansi antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar siswa, dapat dihitung dengan menggunakan rumus uji signifikansi korelasi product moment yakni uji “t”, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\
 &= \frac{0,36004 \sqrt{131-2}}{\sqrt{1-0,36004^2}} \\
 &= \frac{(0,36004)(11,35)}{\sqrt{1-0,36004^2}}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{4,08645}{0,12962} = 3,15263$$

Berdasarkan perhitungan uji signifikansi di atas, diperoleh sebesar 3,15263 signifikansi diperoleh 5% dengan dk = n-2 yakni 131-2 = 129 maka diperoleh 0,171. Berdasarkan hasil data di atas maka diperoleh tingkat signifikansi yang berada pada kategori signifikan.

#### 4.6.3 Uji Determinasi

Untuk mengetahui besaran korelasi atau hubungan antara Modernisasi sistem administrasi pajak (X) kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan (Y) dapat dilakukan melalui analisis koefiensi determinasi, maka dilakukan proses perhitungan dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{Koefisien determinasi} &= r^2 \times 100 \\
 &= (0,36004)^2 \times 100\% \\
 &= 68,9\%
 \end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa 68,9% hubungan Modernisasi sistem administrasi pajak (x) dengan kepatuhan wajib pajak (Y).

### 4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

#### 4.7.1 Korelasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pratama Kota Pangkalpinang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Melihat hasil analisis dengan menggunakan analisis Korelasi Product Moment diperoleh nilai rhitung sebesar 0,36004 sedangkan rtabel pada taraf signifikan 5% dengan N 131-2 = 129 diketahui sebesar 0,171. Jadi rhitung lebih besar dari atau (0,36004 > 0,171), sehingga dapat disimpulkan bahwa, “ terdapat korelasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pratama Kota Pangkalpinang”. Kemudian untuk dapat melihat signifikansi korelasi diperoleh sebesar



3,15263 dan pada taraf signifikan 5% dengan  $dk = n-2$  yakni  $131-2 = 129$  maka diperoleh 0,171. Karena lebih besar daripada  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “terdapat korelasi (hubungan) yang signifikan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pratama Kota Pangkalpinang”.

#### 4.7.1 Korelasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pratama Kota Pangkalpinang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Melihat hasil analisis dengan menggunakan analisis Korelasi Product Moment diperoleh nilai  $r$  hitung sebesar 0,36004 sedangkan  $r$  tabel pada taraf signifikan 5% dengan  $N 131-2 = 129$  diketahui sebesar 0,171. Jadi  $r$  hitung lebih besar dari atau ( $0,36004 > 0,171$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa, “terdapat korelasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pratama Kota Pangkalpinang”. Kemudian untuk dapat melihat signifikansi korelasi diperoleh sebesar 3,15263 dan pada taraf signifikan 5% dengan  $dk = n-2$  yakni  $131-2 = 129$  maka diperoleh 0,171. Karena lebih besar daripada  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “terdapat korelasi (hubungan) yang signifikan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pratama Kota Pangkalpinang”.

#### PENUTUP

Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan,

tanpa mendapatkan prestasi kembali, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Reformasi administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ekonomis, dan kecepatan dalam pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kepatuhan wajib pajak sangat penting, dan penelitian ini menunjukkan adanya korelasi signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pratama Kota Pangkalpinang. Saran dari penelitian ini adalah bagi KPP Pratama Pangkalpinang untuk terus meningkatkan pelayanan, memberikan penjelasan, dan kemudahan agar berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, pengetahuan, pendidikan, penghasilan, dan persepsi terhadap sanksi perpajakan.

#### REFERENSI

- Alfina, Z.&Diana, N. (2021). “Pengaruh insentif perpajakan akibat covid-19, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (studi pada wajib pajak yang terdaftar di kpp pratama malang utara).”*E-jra*, 10(4), 47–57.
- Saputri, S.&Rahayu, Y. (2021). Pengaruh penerapan e-filing, e-billing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid-19.”*Jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 10(7), 1–15.

- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *reformasi perpajakan* (<https://www.pajak.go.id/id/reformasi-perpajakan>).
- Kiswara, Endang. dan Saraswati, Prita. (2011). "analisis terhadap penerapan theory of consumer acceptance technology pada e-spt". *Journal of accounting* Volume 2 no 2, semarang: universitas diponegoro.
- Ajzen, I. (1991). "Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human*.
- Ajzen, I. (2014). "Residual Effects of Past on Later Behavior : Habituation and Reasoned Action Perspectives Residual Effects of Past on Later Behavior". *Personality and Social Psychology Review*, Vol. 6, No. 2, pp. 107-122.
- Dhiah Ayu, L. (2022). *Pengaruh sistem administrasi e-registration, e-filling dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama koja jakarta utara* (doctoral dissertation, sekolah tinggi ilmu ekonomi indonesia jakarta).
- Edrianita, T.& Mursal, M. (2021). "Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (kpp) pratama selatan batam kota." *Zona keuangan: program studi akuntansi (s1) universitas batam*, 11(3), 1-13.
- Fasmi, Lasnofa dan Fauzan Misra. (2014) "modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak." *jurnal akuntansi multiparadigma*.
- Fauzi, F. Dencik, A. B. & Asiati, D. I. (2019). *Metodologi penelitian untuk manajemen dan akuntansi: aplikasi spss dan eviews untuk teknik analisis data*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20, Edisi Keenam*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Kurniawati, M. & Toly, A. A. (2014). "Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di surabaya barat." *tax & accounting review*.
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka)." *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358-367.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan. Edisi revisi 2009*. Yogyakarta. Andi
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta : Alfabeta
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta : Andi.
- Nazir, Moh. (2017). *Metode penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi administrasi publik: teori dan praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). "Analisis penerapan modernisasi sistem administrasi

- perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 77-97.
- Pohan. (2017). *Pembahasan komprehensif pengantar perpajakan teori dan. Konsep hukum pajak*. Jakarta : Mitra Wancana Media..
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan:teori dan kasus buku 1*. Jakarta : Salemba Empat
- Resmi, siti. (2017). *Perpajakan : teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Richa, I. (2019). *Penerimaan pajak kota batu 2018 tak mencapai target, ini yang dilakukan 2019*. ([www.malangtimes.com](http://www.malangtimes.com)).  
<https://www.google.com/amp/s/www.malangtimes.com/amp/baca/37173/20190319/171300/penerimaan-pajak-kota-batu-2018-tak-mencapai-target-ini-58-yang-dilakukan-2019>
- Sadhani, Djazoeli. (2012). *Pajak menuju good governance melalui modernisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Silva, Patrícia. (2015) "davis' technology acceptance model(tam)(1989). " *information seeking behavior and technology adoption: theories and trends*.
- Sobari, Rizky Nurmeida. (2014). *Tingkat kepuasan peserta didik terhadap pelayanan proses pembelajaran di smk averus*, UIN : Jakarta.
- Soemitro dan Sugiharti. (2004). *Asas dan dasar perpajakan 1 edisi revisi*. Bandung : refika aditama.
- Sofyan, T.M. (2005). “Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar. Skripsi tidak dipublikasikan.” Sekolah tinggi akuntansi negara.
- Sugiarto, S.& Mulyani, H. T. S. (2020). “Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak teradap orang pribadi usahawan (studi kasus pada kpp pratama pangkalpinang tahun 2018).” *Jurnal akuntansi bisnis & keuangan*, 7(2), 51-60.
- Sugiono. (2017). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Bandung : alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Tokan, Ratu Ie. (2016). *Manajemen penelitian guru untuk pendidikan bermutu (panduan penulisan skripsi, tesis , disertasi, karya ilmiah guru-dosen, dan kebijakan pendidikan)*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

**BIODATA PENULIS**

Fikri Andra Aditya, Karmawan, Julia

